



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 694-709

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pendidikan Islam Dan Kebangkitan Cendekiawan Muslim

Zulmuqim^{1✉}, Duski Samad², Tabrani³

Program Pascasarjana (S.3), Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang

Email: tabrani.idris1@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan Islam berlangsung sejak munculnya Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan era modern ini yang mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari metodenya, keilmuannya maupun kelembagaannya. Seiring dengan perkembangan zaman maka pendidikan Islam pun berkembang pesat termasuk di Indonesia yang notabenehnya penganut Agama Islam terbesar di Dunia. Sejak awal abad ke-13 M awal Islam di Nusantara berkembang dengan corak Sufistik, sehingga mempengaruhi para pemikir-pemikir Islam pada masa itu yang berlangsung selama lebih kurang empat abad

Kata kunci : *Pendidikan Islam Dan Kebangkitan Cendekiawan Muslim*

Abstract

Islamic education has taken place since the emergence of Islam brought by the Prophet Muhammad SAW to this modern era which has experienced very rapid development both in terms of its methods, science and institutions. Along with the times, Islamic education is also growing rapidly, including in Indonesia, which incidentally has the largest adherents of Islam in the world. Since the beginning of the 13th century AD, early Islam in the archipelago developed with a Sufistic style, thus influencing Islamic thinkers at that time which lasted for more than four centuries.

Keywords: : *Islamic Education and the Rise of Muslim Scholars*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam berlangsung sejak munculnya Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan era modern ini yang mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari metodenya, keilmuannya maupun kelembagaannya. Seiring dengan perkembangan zaman maka pendidikan Islam pun berkembang pesat termasuk di Indonesia yang notabenehnya penganut Agama Islam terbesar di Dunia.

Sejak awal abad ke-13 M awal Islam di Nusantara berkembang dengan corak Sufistik, sehingga mempengaruhi para pemikir-pemikir Islam pada masa itu yang berlangsung selama lebih kurang empat abad.

Pada abad ke-17 dan ke-18 M, muncul ide-ide pembaharuan pemikiran Islam, sebagai akibat dari hubungan kalangan terpelajar Nusantara dan Timur Tengah, namun pengaruh pemikiran sufistik pada berbagai kalangan Muslim masih cukup kuat. Hal ini ditandai dengan berbagai ajaran kelompok tarekat dan sufi di Nusantara. Sementara menjelang abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika kalangan Muslim terpelajar Indonesia berkenalan dengan ide-ide Barat secara lebih intensif dan signifikan mempengaruhi cara pandang masyarakat Islam terutama para cendekiawan, untuk lebih memahami dan mereaktualisasikan ajaran-ajaran Islam ke realitas sosial mereka. Dalam konteks ini muncul beberapa pemikir Islam Indonesia seperti Moh. Natsir dan Agus Salim, pada dekade sebelumnya telah muncul Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan.

Hingga Paruh pertama abad ke-20, pusat-pusat Studi Islam tertinggi bagi kalangan masyarakat Muslim Nusantara masih berada di Wilayah Timur Tengah, Khususnya Mekkah yang kemudian bergeser ke Kairo, Mesir, namun yang menjadi catatan bahwa adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh kalangan terpelajar Muslim pada tahun 1930-an untuk mendirikan berbagai lembaga pendidikan Tinggi yang diharapkan setingkat dengan akademis.

Pada 1960, pemerintah Indonesia resmi mendirikan IAIN di Jakarta dan Yogyakarta yang merupakan perpanjangan dari lembaga pendidikan Tinggi Agama yang telah berkembang jauh sebelumnya. Kemudian pada era tahun 1970-an wacana pembaharuan pemikiran keislaman semakin marak, Generasi muda dari kalangan terpelajar Muslim pada dekade ini sudah lebih menunjukkan kecenderungan pemikiran yang tidak lagi normatif memandang agama. Mereka tidak seperti pada masa Islam yang bercorak mistis-sufistik, mereka lebih tertarik pada pendekatan-pendekatan empiris dan historis di dalam pembentukan visi keagamaannya. Pada perkembangan selanjutnya IAIN semakin berperan dalam menghasilkan para intelektual/cendekiawan yang pada masa orde baru terbentuknya ICMI.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kajian ini dilihat dari tempat penelitian dilakukan yaitu perpustakaan. Adapun penelitian ini yang berupa penelitian pustaka, maka dalam proses pengumpulan datanya, maka penulis menghimpun data berupa informasi melalui literatur literatur yang penulis peroleh di perpustakaan berupa buku- buku ataupun artikel- artikel yang penulis gunakan dalam mengkaji pengertian-pengertian, dan aspek-aspek bagaimana gambaran perkembangan cendekiawan muslim Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam dan Perannya dalam Mempertahankan Ajaran Islam

Pendidikan keagamaan memiliki akar sejarah panjang di negeri ini. Jauh sebelum merdeka, dikalangan masyarakat telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan agama yang dikenal dengan pesantren dan madrasah. Setelah melalui interaksi dengan sistem pendidikan modern yang disosialisasikan pemerintah penjajah Belanda, pesantren dan madrasah akhirnya muncul sebagai lembaga pendidikan modern. Secara umum sejarah mengandung kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia, karena sejarah menyimpan kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan serta perkembangan umat manusia.

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar; pertama, sebagai dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar global.

Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural, secara makro persoalan yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan disain atau konstruksi wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan masyarakat. Kemudian disain wacana pendidikan Islam tersebut dapat ditransformasikan secara sistematis dalam masyarakat. Persoalan pertama ini lebih bersifat filosofis, yang kedua lebih bersifat metodologis. Pendidikan Islam perlu menghadirkan suatu konstruksi wacana pada dataran filosofis, wacana metodologis, dan juga cara menyampaikan atau mengkomunikasikannya.

Lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang menawarkan ide

pentingnya menjaga moralitas untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang kuat. Dengan dasar bangunan moral yang kuat, tentu saja bangsa ini bisa melakukan proses seleksi dan filter terhadap segala macam kebudayaan baru yang masuk sebagai efek perkembangan, keterbukaan, dan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa saat ini, lembaga pendidikan Islam merupakan benteng moral terkokoh yang dimiliki bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi, teknologi, dan informasi. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun.

Sementara, pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada awal abad 20. Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

Munculnya gerakan pembaruan di Indonesia pada awal abad 20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks. Gerakan-gerakan pembaruan Islam di Indonesia memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda. Menurut Karel Steenbrink, paling tidak ada empat hal penting yang mendorong terjadinya perubahan Islam di Indonesia pada awal abad 20: (1) keinginan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, (2) semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan Belanda, (3) usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasi di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, dan (4) dorongan pembaruan pendidikan Islam.

Dalam menghadapi peradaban modern, yang perlu diselesaikan adalah persoalan-persoalan umum internal pendidikan Islam yaitu (1) persoalan dikotomik, (2) tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam, (3) persoalan kurikulum atau materi. Ketiga persoalan ini saling interdependensi antara satu dengan lainnya.

Pertama, Persoalan dikotomik pendidikan Islam, yang merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan sampai sekarang. Pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama. Karena, dalam pandangan seorang Muslim, ilmu pengetahuan adalah satu berasal dari Allah SWT.

Kedua, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada. Memang diakui bahwa penyesuaian lembaga-lembaga pendidikan akhir-akhir ini cukup menggembirakan, artinya lembaga-lembaga pendidikan memenuhi keinginan untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu umum dan ilmu agama serta keterampilan.

Tetapi pada kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan dengan pola tambal sulam atau dengan kata lain mengadopsi model yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga pendidikan umum. Artinya, ada perasaan harga diri bahwa apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum dapat juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama, sehingga beban kurikulum yang terlalu banyak dan cukup berat dan terjadi tumpang tindih. Sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi, apakah mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, atau mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan yang berkualitas, mampu bersaing, dan mampu mempersiapkan mujtahid-mujtahid yang berkualitas.

Banyak pola yang digunakan kelompok akademisi dan ilmuwan muslim di Indonesia dalam mengembangkan PTAI. Otonomi daerah sebagai implikasi reformasi menuntut ilmuwan merekonstruksi ulang eksistensi PTAI. Tuntutan ulang itu mengkristal upaya perubahan status, walaupun perubahan tersebut masih dilakukan oleh sebagian besar perguruan Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pada pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 5 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan tujuan pendidikan tinggi untuk:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika diperhatikan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi tersebut di atas jelas bahwa tujuan pendidikan di Indonesia menekankan pada faktor intelektual, akademik, profesional, iman, dan takwa serta etika yang meliputi kepribadian dan bertanggungjawab.

Perguruan Tinggi Agama Islam, secara sadar harus berani mengkaji ulang visi, misi, tujuan serta paradigma keilmuan yang pernah dibangunnya selama kurang lebih 50 tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa misalnya, tujuan didirikannya IAIN antara lain dimaksudkan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat.

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden No.11 tahun 1960 tentang pembentukan IAIN ditegaskan, IAIN bermaksud memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat mengembangkan serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Dengan demikian, lembaga pendidikan tinggi Islam ini, merujuk pendapat Azyumardi Azra memikul dua harapan: *social expectations* (diharapkan mampu memberikan respon dan jawaban Islam terhadap tantangan-tantangan zaman) dan *academic expectations* (diharapkan mampu mengembangkan dirinya sebagai pusat dan pengembangan Islam).

Dalam kerangka kedua ekspektasi itu, umat Islam mengharapkan lahirnya para pemikir dan pemimpin Islam atau para ulama terkemuka dari lembaga pendidikan tinggi agama (Islam) ini. Oleh karena itu, sebagai tempat menghasilkan para pemikir Islam, lembaga pendidikan tinggi agama (Islam) harus menciptakan iklim yang kondusif dan memungkinkan tumbuh berkembangnya ide segar berkenaan pengamalan serta aktualisasi ajaran Islam dalam abad modern saat ini.

Sebagai wadah pembinaan calon para pemimpin dan ulama Islam, oleh sebab itu, dituntut pula memberikan bekal kepemimpinan dan intelektualitas yang teruji, dengan integritas pribadi, dan akhlak mulia, sehingga dapat diteladani masyarakat lainnya.

Menurut Rusdiana dan Nasihudin, peran PTAI dan kondisi studi Islam, mempunyai tiga tugas yang termaktub dalam tridarma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan demikian PTAI diharapkan, (1) mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i sesuai dengan fakultas, jurusan dan program studi yang ditawarkan, (2) mampu mengembangkan bidang-bidang ilmu yang ada, (3) dapat membantu masyarakat dalam menghadapi problem dan tantangan yang mereka hadapi.

Wacana pengembangan studi Islam di PTAI pada masa-masa sekarang dibuka kembali seiring dengan tantangan-tantangan yang semakin kompleks dan kesempatan-kesempatan yang mungkin semakin terbuka. PTAI saat ini memiliki tanggung jawab yang sangat berat.

Disuatu sisi ia harus sesuai dengan harapan stakeholders (Masyarakat Muslim Khususnya) dan menjawab tantangan global dan sisi lain PTAI harus menyajikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan koridor-koridor akademis.

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang secara formal disertai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengisi kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam, berdasarkan hal tersebut, struktur perguruan tinggi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu pertama, perguruan tinggi umum (PTU) yang dikelola oleh Departemen pendidikan nasional, kedua, perguruan tinggi agama Islam (PTAI) yang dikelola oleh Departemen Agama.

Pengelompokkan seperti ini berimbas kepada jenis penyelenggaraan pendidikan agama yang dibedakan antara dua program dengan tujuan. Pertama, pendidikan agama dengan tujuan mencetak para ahli agama (ulama), intelektual muslim, dan cendekiawan muslim. Kedua, pendidikan agama dengan maksud memenuhi kewajiban setiap orang mengetahui dasar-dasar ajaran agamanya sebagai seorang pemeluk agama. Sementara itu, konsentrasi pembangunan yang fokus di bidang material dewasa ini telah melahirkan kehidupan yang timpang. Di satu sisi berlebihan dalam hal materi, tetapi di sisi lain merasa kosong secara metal spiritual. Di sini lembaga pendidikan Islam menjadi alternatif, yakni menyeimbangkan antara pengetahuan umum dan agama.

Banyaknya alumni IAIN yang menjadi kyai atau ustadz di pesantren memang bisa diharapkan akan membawa satu bentuk budaya keislaman baru modern, kontekstual, dan rasional, sebagaimana dikembangkan di IAIN.

Pada gilirannya mereka akan memberikan efek yang lebih besar melalui proses pendidikan yang dilakukannya. Misalnya Nurcholish Madjid, beliau lulusan IAIN syarif Hidayatullah Jakarta, sejak tahun 1970-an, berbagai gagasan dan pemikiran kritisnya dikemukakan dalam artikel-artikel yang dimuat dalam berbagai harian ibukota kala itu seperti *Tribun*, *Pos Bangsa* dan *Mimbar*. Beliau dikenal sebagai seorang cendekiawan yang kritis dan telah mensosialisasikan ide-ide pembaharuan.

Posisi IAIN sebagai institusi pendidikan Islam, memang terus mengalami perubahan. Tidak saja karena perkembangan keilmuan yang terus mengalami pengayaan. Sebagai lembaga berafiliasi kepada agama, IAIN mulanya dimaknai sebagai lembaga dakwah Islam yang bertanggung jawab terhadap syiar agama di masyarakat. Sehingga orientasi kepentingannya lebih difokuskan pada pertimbangan-pertimbangan dakwah. Tentu saja orientasi ini tidak keliru.

Hanya saja, menjadikan IAIN sebagai lembaga dakwah pada dasarnya telah mengurangi peran yang semestinya lebih ditonjolkan, yaitu sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Karena IAIN sebagai lembaga akademis, maka tuntutan dan tanggungjawab yang dipikul oleh IAIN adalah tanggungjawab akademis ilmiah.

2. Kebangkitan Cendekiawan Muslim di Indonesia

Istilah cendekiawan adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagag, dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Fungsi utama seorang "cendekiawan" bukan sekadar berpikir tentang kebenaran tetapi harus menyuarakannya, apapun rintangannya. Seorang cendekiawan yang benar tidak boleh netral, dan harus memihak kepada kebenaran dan keadilan. Sedangkan cendekiawan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berfikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu".

Dapat disimpulkan bahwa orang yang selalu berpikir untuk menyampaikan kebenaran dalam berbagai bidang ilmu demi terciptanya keselamatan bersama adalah cendekiawan. Sedangkan yang dimaksud cendekiawan muslim adalah orang yang berfikir secara benar yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits untuk kemaslahatan manusia.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, dominasi kelompok abangan mulai menurun dan hegemoni kaum santri mulai menguat. Lonceng kematian dominasi kaum abangan Jawa dalam birokrasi Orde Baru kemudian "dibunyikan" oleh Presiden Soeharto sendiri yang sebelumnya dikenal sebagai abangan dan jauh dari tradisi Islam pada tanggal 6 Desember 1990, ketika meresmikan berdirinya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI),

Pendirian ICMI ini cukup fenomenal. Berbagai respon dan komentar muncul disekitar pendiriannya. Bagi para sarjana seperti Robert Hefner, Nakamura, Douglas Ramage dan Arief Budiman, kemudian juga para pendukung dan aktifis ICMI yaitu Kuntowijoyo, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Imaduddin Abdulrahim dan Amien Rais, ICMI adalah simbol kebangkitan politik Islam dan jalan pintu masuk bagi kalangan Islam ketika itu untuk bisa berperan di pusat kekuasaan setelah sekian lama terpinggirkan. Tetapi bagi yang lain, yang dikenal sebagai analis sekuler, seperti Abdurrahman Wahid dan William Liddle, ICMI tidak lain adalah bentuk kooptasi Soeharto atas kelompok Islam yang sedang naik untuk tujuan politiknya yaitu pemilu 1992. Bagi Wahid dan Liddle, ketika Soeharto menjadi presiden lagi untuk periode berikutnya, ICMI akan ditinggalkan begitu saja dan akan kehilangan kekuasaannya.

Bagi kelompok ini, ICMI adalah kendaraan untuk kepentingan politik kelompok Muslim "modernis radikal" (yaitu posisi di pemerintahan atau mendirikan negara Islam). Kasus kejatuhan Soeharto kemudian menunjukkan bahwa pandangan sekuler ini tidak terbukti. Setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998, ICMI masih tetap berdiri bahkan pengaruhnya menguat di masa-masa awal reformasi dengan terpilihnya Habibie sebagai presiden dan banyak anggotanya menjadi menteri. Sebuah organisasi modern yang paling

representatif mempresentasikan telah hadirnya sebuah kelas sosial baru di tengah-tengah umat Islam Indonesia yaitu kelas menengah Muslim.

Perubahan sosial politik yang sedang terjadi ketika itu, ICMI tumbuh menjadi kekuatan kelas menengah yang signifikan. Menurut catatan Arief Budiman, banyak anggotanya menjadi anggota parlemen dan menjadi menteri. Koran baru yaitu *Republika* didirikan dan sebuah bank Islam yaitu Bank Muamalat juga berdiri. CIDES, lembaga kelompok akademisi dan para pemikir muda juga dibentuk dan mulai bekerja. Dengan cepat, kelas menengah Muslim ini telah berpengaruh besar dalam dinamika Islam di Indonesia.

ICMI saat itu sangat berpengaruh sebagai organisasi kelas menengah yang sedang berkembang cepat dan meluas. Pada kongres kedua di Jakarta, 1.200 delegasi hadir, mewakili 42.000 anggotanya dari seluruh propinsi di Indonesia. Dari komunitas-komunitas Islam luar negeri juga berpartisipasi. Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie, yang dipandang sebagai menteri favoritnya Soeharto, terpilih menjadi pemimpinnya yang kedua kali. 16 menteri, hampir setengahnya dari anggota kabinet, duduk di jajaran ketua-ketua ICMI dan presiden Soeharto sendiri berperan sebagai Pelindung.

Bagi kelas menengah di wilayah-wilayah perkotaan, ICMI telah menjadi simbol kebangkitan *political capital* kelompok Islam. Lebih dari itu, ICMI juga telah menjadi simbol identitas Islam modern dimana umat Islam tidak lagi merasa terbelakang dan marginal. Dewi Fortuna Anwar merasakan betul perubahan citra ini. "Dulu, Islam diasosiasikan dengan keterbelakangan dan kemiskinan, dan kalangan Islam cenderung merasa rendah diri dengan kelslaman mereka, tetapi sekarang Islam tidak lagi dipandang sebagai agamanya orang-orang yang kalah".

Dengan kata lain, melalui ICMI, Islam mempresentasikan dirinya dalam citra yang modern. Salah satu dampaknya adalah tahun 1990-an, modernitas ICMI telah memberikan landasan bagi banyak kalangan Islam untuk mulai menunjukkan identitas kelslaman mereka yang sebelumnya kurang percaya diri. Fenomena psikologis keagamaan telah muncul dimana para pejabat pemerintah dan para birokrat "berlomba" menunjukkan identitas kelslaman mereka.

Pada saat kelompok abangan menguasai birokrasi pemerintahan dan militer, menunjukkan identitas kelslaman secara terbuka adalah sesuatu yang "tidak mungkin" karena kelslaman identik dengan ancaman pada negara dan telah menjadi stigma anti Pancasila. Istilah "satinisasi birokrasi" atau "birokratisasi santri" telah menjadi jargon yang populer untuk menggambarkan hubungan yang membaik antara Islam dan negara. Begitu kuatnya perubahan simbol-simbol hegemoni budaya ketika itu, muncul tren sosial kultural di kalangan elit Indonesia, kelas menengah Muslim di kota-kota besar dan kelompok terpelajar yaitu munculnya perasaan *out of date* jika mereka tidak terlibat dalam diskursus

ICMI atau tidak menjadi anggota.

Liddle memperlihatkan keheranannya dan cukup terkejut melihat orang-orang yang tidak memiliki latar belakang keislaman atau sebelumnya tidak simpati kepada perkembangan Islam seperti Wakil Presiden Try Sutrisno (Panglima ABRI 1988-1993) mantan Wakil Presiden Sudharmono, yang dalam masa perjuangan revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949 diduga memiliki keterkaitan dengan gerakan sayap kiri (PKI), Ginanjar Kartasasmita (mantan aktifis PNI) dan Jenderal Rudini (mantan Kasad dan Menteri Dalam Negeri), semuanya berpartisipasi dalam pendirian ICMI. Keheranan Liddle belum habis, "banyak aktifis dan intelektual Muslim di luar lingkaran negara juga tercatat di antara 148 pengurus ICMI." Mereka termasuk KH. Ali Yafie, Sri Bintang Pamungkas, Imaduddin Abdurahim, beberapa unsur pimpinan NU (yang memiliki sekitar 30 juta pengikut) dan Amien Rais (Pemimpin Muhammadiyah, organisasi pendidikan terbesar di Indonesia) yang saat itu "memainkan peranan kunci dalam kongres dan terpilih sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI".

Terlepas dari terjadinya mobilisasi kaum santri, ada juga faktor resiprokal (saling keterpengaruhan) antara pemerintah dan umat Islam. Nurcholis Madjid mendeskripsikan saling keterpengaruhan ini sebagai "titik temu kondisi-kondisi obyektif dan subyektif." Kondisi obyektif adalah diterimanya Islam oleh pemerintah dan kondisi subyektif adalah harapan kalangan Islam untuk mendominasi pemerintahan. Dua kondisi ini, menurut Cak Nur, terlihat dari proses penghijauan di DPR/MPR sebagai hasil dari Islamisasi tahun 1990-an. Bagi Cak Nur, Islamisasi yang ekstensif dan kemunculan kelas menengah Muslim tahun 1990-an adalah sebagai hasil dari proses panjang hubungan Islam dan pemerintah. Tahun 1950-an dibuat kesepakatan antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, ketika itu disepakati bahwa sekolah-sekolah agama akan mendapat pendidikan umum, dan sebaliknya, sekolah-sekolah umum akan mendapatkan pendidikan agama. Akibatnya, banyak orang tua santri ketika itu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum karena mereka tidak memiliki beban psikologis lagi.

Sebagai hasilnya, menurut Cak Nur, di tahun 1960-an, mereka yang bergelar BA banyak sekali. Di tahun 1970-an, jumlah sarjana melimpah. Namun, saat itu mereka masih disibukkan oleh urusan-urusan individunya. Sebagian mereka mencari lapangan kerja dan yang lain menikah. Tahun 1980-an, para sarjana Islam ini mulai bergerak keluar komunitas dirinya sehingga ekspresi keislaman tampak di kantor-kantor, di hotel-hotel, birokrasi dan sebagainya. Namun, ini pun baru sebagai fenomena sosial. Baru di tahun 1990-an, pengaruh dan nuansa politiknya mulai terasa. Dan ini adalah sebuah perkembangan yang bisa dimengerti. Jika perkembangan ini dibendung, kata Cak Nur, akan berbahaya karena akan melawan arus. Soeharto yang sudah sangat faham akan proses pembangunan, cukup

bijaksana menangkap arus gelombang ini, makanya ia kemudian mendukung pembentukan ICMI. Soeharto akan merasa aman bersama komunitas Islam yang sedang menguat. Dari perspektif ini, proses penghijauan atau menguatnya Islam dalam pemerintahan adalah sebuah proses alami dan akan terus terjadi sampai keseimbangan baru terjadi.

Menguatkan kesimpulan ini, Aswab Mahasin mengatakan bahwa kelas menengah Muslim adalah bukti dari dua fenomena: Pertama, apa yang disebut Aswab sebagai "borjuisasi anak-anak Muslim atau priyayisasi santri." Aswab tidak setuju dengan pendekatan "ekonomi bazar". Geertz mengatakan bahwa pengiriman anak-anak kaum santri ke sekolah-sekolah modern adalah basis dari munculnya generasi baru karena melalui rute pendidikan modern ini, anak-anak Muslim masuk dalam kelas sosial baru yaitu kelas menengah. Melalui penjelasan ini, Aswab sesungguhnya menegaskan ide Bourdieu pemikir Posmodern asal Perancis tentang "*cultural capital*."

Bourdieu mengamati bahwa untuk meraih dan mempertahankan posisi kelas dalam masyarakat, masyarakat modern tidak lagi mewariskan modal-modal material pada anak-anak mereka melainkan membekalinya dengan '*cultural capital*' (modal kultural) berupa lingkungan belajar (keahlian komputer, kursus-kursus dan lain-lain), nilai-nilai pendidikan atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan posisi sosial yang lebih baik di masyarakat. Melalui transfer modal kultural ini, anak-anak modern akan memiliki sejumlah keistimewaan-keistimewaan sosial sehingga dapat memasuki lingkaran-lingkaran elit masyarakat walaupun dengan absennya kekayaan individu. Kedua, pencarian ekspresi religius kelas menengah Muslim disebabkan proses sekularisasi yang kuat, mereka tidak menemukan kehidupan yang damai dan menentramkan dalam peradaban modern yang akhirnya mendorong mereka kembali pada nilai-nilai agama.

Kepasrahan pada nilai-nilai agama dalam masyarakat Islam dapat menyembuhkan mereka dari gejala-gejala krisis sosial dan ekonomi, karena agama dapat memberikan realisme moral yang terumuskan dengan baik dan dapat membendung konsep-konsep duniawi.

Kebutuhan akan peneguhan moral ini membantu menjelaskan mengapa, walaupun ada asumsi bahwa agama telah mengalami erosi oleh proses politik pada era pasca kemerdekaan, peranan agama sebagai sebuah kekuatan sosial semakin tumbuh berkembang.

Dengan kemunculan kelas ini, posisi politik kalangan Islam pada tahun 1990-an telah berubah secara drastis. Mereka memiliki bargaining position dan diperhitungkan. Kaum Muslimin, kata Arief Budiman, bergerak "dari gerakan berbasis kelas bawah, sekarang telah mengalami transformasi kepada kelas menengah. Dari gerakan di luar lingkaran kekuasaan, sekarang sedang bergerak dalam struktur negara".

Dengan kata lain, kelompok Islam yang sebelumnya berada dalam posisi marjinal sekarang telah menjadi gerakan berpengaruh dalam pusat kekuasaan dan sedang menciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. "Setelah hampir tiga dekade Orde Baru berkuasa," ujar Syafii Maarif, "baru dalam kabinet Pembangunan VI tahun 1993 ini, jumlah menteri secara seimbang merefleksikan komposisi penduduk Indonesia dimana umat Islam adalah mayoritas. Sekitar 90% dari jumlah menteri adalah dari kelompok santri, baik secara kuantitas maupun kualitas. Begitu besarnya pengaruh politik Islam saat itu dan begitu banyaknya kaum santri duduk di pemerintahan, William Liddle menyebut periode tahun 1990-an sebagai "*Islamic Turn in Indonesia*" (Giliran Islam di Indonesia). Tumbuhnya pengaruh politik yang kuat kelompok Islam terpelajar ini, diakui oleh beberapa ahli, sebagai bukti kuat telah hadirnya sebuah menengah Muslim di Indonesia.

Dengan menyimak sejarah singkat lahirnya ICMI sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ICMI dibentuk karena pada saat itu timbul perbedaan pandangan diantara sesama cendekiawan muslim karena dampak pembaharuan pemikiran keagamaan dalam Islam di Indonesia.

3. Tujuan Pendirian ICMI dan Perkembangannya

1. Tujuan Pendirian ICMI

Ada tiga hal yang merupakan pangkal pandangan dasar ICMI: ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan ke-Cendekiawanan. Sifat dasar ke-Islaman memberinya landasan bagi pandangan-pandangan yang universal. Sifat ke-Indonesiaan menyediakan lingkup penerjemahan pandangan ke-Islaman yang universal dalam konteks ruang dan zaman modern.

Sifat ke-Cendekiawanan merupakan tumpuan amanat khusus yang diemban ICMI dalam perjuangan membangun masyarakat dan bangsa. Cendekiawan muslim adalah orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani.

ICMI didirikan dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhai Allah SWT dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa tujuan pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) untuk membentuk sebuah wadah bagi para

pendekawian muslim untuk beramal, berkreasi, berkomunikasi, dan berprestasi guna mengangkat harkat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

2. Perkembangan ICMI

a. Habibie Sebagai Ketua ICMI

Ketika ICMI dilahirkan, banyak kalangan ketika itu menilai konstalasi politik berubah, meskipun ICMI bukan sebuah partai politik dan ketika diangkatnya Habibie sebagai ketua ICMI, karena beliau merupakan orang birokrasi pemerintah (Menristek) sehingga sejumlah pengamat menilai bahwa kehadiran ICMI lebih tampil sebagai organisasi politik dari pada sebuah ikatan cendekiawan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, dalam sebuah sumber dijelaskan bahwa Figur Habibie sebagai ketua ICMI adalah faktor yang harus diperhitungkan, posisi Habibie ketika itu menjadi jaminan bahwa ICMI tidak bermain api dengan penguasa. Habibie ini merupakan sebuah pisau bermata dua bagi ICMI, disatu sisi pisau itu bermanfaat bagi ICMI karena kapasitas dan kapabilitas Habibie membuat ICMI memiliki payung kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, serta memiliki akses langsung kepemilik kekuasaan paling kongkrit dan luas di Indonesia. Akan tetapi disisi lain justru menjadi ancaman bagi ICMI, karena kedatangan Habibie cukup potensial untuk membuat ICMI menjadi terlampau mesra dengan kekuasaan, dan pada gilirannya mengganggu kemandirian ICMI sebagai aktualisasi politik cendekiawan dan umat. Maksud ke depannya nanti ICMI akan independen atau tidak.

Ketika mengumumkan susunan pengurus ICMI tanggal 13 Februari 1991, Habibie menegaskan bahwa ICMI bukan organisasi politik dan massa yang bernaung di bawah organisasi politik. Dengan demikian, penjelasan tersebut merupakan suatu pertanda bahwa ICMI bukan sebuah organisasi politik, sekalipun B.J.Habibie pada saat itu sebagai Menristek, akan tetapi dalam memimpin ICMI beliau tidak mencampuradukkan antara politik dengan misi organisasi tersebut.

b. Perjalanan ICMI di Bawah Orde Baru

Ketika dalam masa Orde Baru berkuasa pada tahun 1966, disambut gembira oleh pemimpin-pemimpin umat Islam, sebab bersamaan dengan munculnya Orde Baru yang terkandung harapan besar memungkinkan kembalinya umat Islam dalam panggung politik nasional.

Namun kenyataannya umat Islam mengalami kekecewaan yang sangat besar dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sehingga mempersempit ruang gerak bagi cendekiawan muslim untuk berkiprah dalam proses pembangunan Nasional. Strategi pembangunan pada awal Orde Baru sebagian besar dirumuskan oleh

kalangan non muslim dan non santri yang didukung oleh ABRI yang memperkuat politik Orde baru. Ketika dukungan ABRI kepada ORBA melemah, pemerintahan Orde Baru memiliki strategi untuk mencari dukungan lain yaitu dengan menyetujui pembentukan ICMI.

Fenomena kelahiran ICMI ini mengandung kontroversi di kalangan publik terutama yang berkaitan dengan sikap pro dan kontra terhadap perlu atau tidaknya sebuah komunitas cendekiawan untuk terlibat dalam struktur kekuasaan Negara. Mereka yang pro, memandang bahwa organisasi ICMI merupakan wadah integratif bagi kekuatan cendekiawan Islam yang ada, sehingga ICMI benar-benar merupakan rahmat bagi umat Islam di Indonesia.

Mereka yang pro juga mengharapkan sudah waktunya Islam memainkan peran yang central dalam perpolitikan nasional, karena selama ini Islam berada dalam posisi pinggiran. Mereka yang kontra tentu saja memiliki alasan tersendiri, akan tetapi alasan yang sangat menonjol adalah kecurigaan, dengan menjadikan Islam sebagai wahana untuk kepentingan kelompok yang sempit dan memutar kembali waktu politik ke belakang dengan pola perpolitikan berdasarkan aliran.

ICMI telah menunjukkan eksistensinya di pentas sejarah perpolitikan nasional, yang akan menjadi pemain utama di dalam menentukan kebijaksanaan Indonesia di masa depan. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan simposium cendekiawan muslim Indonesia. Mengatakan bahwa "pengabdian kaum cendekiawan adalah merumuskan alternatif kebijaksanaan dua strategi bagi masa depan bangsa Indonesia karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi telah mendorong dinamika perubahan dunia dalam waktu yang agak cepat".

Dengan demikian, keterampilan para cendekiawan muslim untuk ikut serta menentukan arah dan sasaran pembangunan bangsa ini mempunyai landasan yang kuat. Dalam perkembangan ICMI seringkali terjebak oleh logika kekuasaan orba dalam merespon persoalan keutamaan. Hal ini dapat dilihat ketidak berdayaan ICMI dalam menyuarakan kepentingan nasib masyarakat yang tertindas oleh perlakuan pemerintahan Orba.

SIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan Islam sebelum lahirnya Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) telah melahirkan berbagai tokoh yang tergolong cendekiawan muslim. Kemudian setelah munculnya PTAI, maka perannya sangat besar untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa secara lmtak dan lptek.

1. Berdasarkan dari peran PTAI dan melihat kondisi umat Islam di Indonesia yang berada pada kelas menengah di masa Orde Baru, makapada tanggal 7 Desember 1990 merupakan lembaran baru dalam sejarah umat Islam Indonesia, secara resmi lkatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang. Tidak bisa dipungkiri bahwa ICMI akan mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin nasional yang cerdas. Hal ini menggambarkan, bahwa salah satu organisasi yang tergolong pada cendekiawan muslim adalah ICMI.

2. Ketika ICMI dilahirkan di Malang, banyak kalangan ketika itu menilai konstalasi peta politik berubah, meskipun ICMI bukan sebuah partai politik, tapi individu-individu di dalamnya banyak dikenal ketokohnya seperti B.J.Habiebie, Imanuddin Abdurrahim, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid, Dawam Raharjo dan tokoh lainnya. Awal pembentukan ICMI membuat rezim pada masa itu khawatir akan pengaruhnya, namun posisi Habibie ketika itu menjadi jaminan bahwa ICMI tidak akan bermain api dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashaf, Abdul Firman. 'Perlawanan Pers Islam Pada Masa Orde Baru'. *Mediator: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2006): 1–14
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Bafadhol, Ibrahim. 'Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia'. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 11 (2017): 14.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. 16. Cambridge university press, 1977.
- Budiman, Arief. 'From Lower to Middle Class: Political Activities Before and After 1988'.
ourchier, D./Legge, J.(Hg.): *Democracy in Indonesia-1950s and 1990s*, 1994, 229–35.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. 4. Pustaka Jaya, 1983.
- . 'Priyayi Dalam Masyarakat Jawa Diterjemahkan Aswan Mahasin'. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Hidayat, Komaruddin, and Hendro Prasetyo. *IAIN Problem Dan Prospek*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- . *Problem Dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal ..., 2000.
- Indonesia, Presiden Republik. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional'. *Lembaran RI Tahun*, no. 20 (2003).
- Indonesia, Republik. 'Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri', Mei 1960.
- . 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi', 2012.
- Islam, Sejarah Pendidikan, Deskripsi Fisik, Salju Kilimanjaro, Kumpulan Cerita Pendek,

- Menuju Muslim Kaffah, and Menggali Potensi Diri. 'Sejarah Pendidikan Islam'. Jakarta: Depag, 1984.
- Jabali, Fuad, and IAIN Jamhari. Modernisasi Islam Di Indonesia. Jakarta: Logos, 2002.
- Liddle, R. William. 'The Islamic Turn in Indonesia: Political Explanation'. *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996): 613–34.
- Maarif, Ahmad Syafii. Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah. PT Mizan Publika, 2009.
- Madjid, Nurcholish. 'Rindu Kehidupan Zaman Masyumi'. Dalam *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Maksum. Madrasah; Sejarah Dan Perkembangannya. Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1999.
- Nizar, H. Samsul. Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam. Batu Sangkar: Kalam Mulia, 2019.
- Qodir, Zuly. Islam Liberal; Varian-Variante Liberalisme Islam Di Indonesia 1991-2002. LKIS Pelangi Aksara, 2010.
- Rahim, Husni. Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 2001.
- Rohman, Rohman. 'Peran Icmi Dalam Pemberdayaan Masyarakat'. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (2015): 99–124.
- Rusdiana, and Nasihudin. Peran Pimpinan PTKIS: Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNi Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada ..., 2021.
- Ruslan, Faryda. 'Politik Hukum Islam Masa Orde Baru Dan Produk Perundang-Undangannya'. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2019): 53–76.
- Setyawan, Cahya Edi. 'Menggagas Model Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis Pesantren'. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).